KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Maskapai Kebanggaan RI Terlilit Utang Rp 70 Triliun: Siapkan Pansus, Senayan Ingin Selamatkan Garuda dari Pailit
Tanggal : Kamis, 11 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Maskapai Kebanggaan RI Terlilit Utang Rp 70 Triliun

Siapkan Pansus, Senayan Ingin Selamatkan Garuda Dari Pailit

Senayan menyoroti kisruh sewa pesawat di Garuda Indonesia. Manajemen Garuda terdahulu diminta pertanggungjawabannya atas kisruh yang membuat maskapai pelat merah ini berutang Rp 70 triliun kepada pihak *lessor* (pemilik pesawat).

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, langkah hukum diperlukan untuk menuntaskan problem ini. Apalagi, karut-marut yang dihadapi Garuda saat ini tidak terlepas dari buruknya tata kelola direksi sebelumnya.

"PDI Perjuangan meminta hukum dan keadilan ditegakkan atas beberapa oknum mantan direksi Garuda. Termasuk Emirsyah Satar (eks dirut Garuda) yang mengaku profesional, namun terjadi *mark-up* atas *leasing* pesawat yang menyebabkan kerugian Garuda," tegas Darmadi di Jakarta, kemarin.

Bagi Darmadi, mark up antara pejabat Garuda dengan lessor ini melanggar *business ethic* dan hukum. Menjadi sangat tidak elok jika pihak lessor menolak renegosiasi atas utang-utang milik Garuda.

Karena itu, Garuda jangan ragu melakukan *suspend* terhadap seluruh kewajiban terhadap pihak lessor yang terbukti melakukan mark-up.



Darmadi Durianto

"Harus ada solusi penyelamatan dan penyehatan Garuda sebagai *flag carrier*. Termasuk memperjuangkan kepentingan karyawan Garuda yang ikut menderita karena perilaku tidak sehat dari para direksi yang lalu ini," tegasnya.

Darmadi meminta direksi sebelumnya menjelaskan secara transparan model bisnis Garuda saat itu. Dan yang paling penting, aparat penegak hukum harus berani mengusut tuntas para direksi periode 2004 sampai dengan 2014. Termasuk direksi, komisaris dan menteri BUMN periode 2014 sampai dengan 2019.

Sebelumnya dikabarkan, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, Garuda memiliki utang sekitar Rp 70 triliun atau setara 4,9 miliar dolar AS.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro mengusulkan pembentukan Pansus untuk menuntaskan masalah yang membelit Garuda Indonesia.

Diharapkan, hasil Pansus ini bisa melahirkan solusi penyelamatan Garuda seperti harapan kebanyakan masyarakat Indonesia. Lewat pansus ini, DPR akan berupaya menyelamatkan maskapai kebanggaan bangsa ini.

"Kita perlu mengurai secara utuh, termasuk mendiskusikan dan mengevaluasi opsi-opsi yang mungkin muncul dan memikirkan opsi yang lebih bagus untuk menyelamatkan Garuda," usulnya. ■ KAL